



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 22 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 22 April 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I

Nip.19710202 199602 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 3/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Semua penduduk Kota Surabaya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuat Keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya Keputusan ini, maka akan memudahkan penduduk Kota Surabaya, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya;
2. Agar semua penduduk Kota Surabaya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih;
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kota Surabaya dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surabaya, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
29. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

BAB II HAK MEMILIH

- I. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- II. (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- III. (1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
(2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

- I. (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
 - (4) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 - (5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
- II. (1) KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
 - (2) KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
 - (3) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran.
- III. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

- IV. (1) KPU Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
- tidak menggabungkan kelurahan;
 - memudahkan Pemilih;
 - hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) KPU Kota menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

- I. (1) KPU Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
- 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- (5) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- (6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
- mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;

- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- (7) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- (8) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
- (10) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- (11) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- II. (1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (9).
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- (3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.

- (4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy*.
 - (5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
- III.
- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (3) dan ayat (4).
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
 - (8) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
 - (9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
 - (10) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

- IV. (1) KPU Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam romawi III ayat (10) huruf a.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
- KPU Provinsi;
 - KPU melalui KPU Provinsi;
 - Panwas Kota;
 - setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (8) KPU Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A1-KWK.
- (9) KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- pengumuman di kantor kelurahan;
 - pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - arsip PPS.

- (10) KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
- V. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam romawi IV ayat (9).

2. Daftar Pemilih Tetap

- I. (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
- Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II romawi II ayat (2);
 - Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pemilih sudah meninggal dunia;
 - Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II romawi II ayat (2).
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
- (4) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- II. (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 romawi IV ayat (7).

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- III.
- (1) KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (7) huruf a.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- (7) KPU Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
 - (8) KPU Kota menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - (9) KPU Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
 - (10) KPU Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
 - (11) KPU Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
- IV. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam romawi III ayat (10).

C. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

- I. (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II romawi II ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- (2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

- (4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- II.
- (1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (4).
 - (2) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- III.
- (1) KPU Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (7) huruf a.
 - (2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) KPU Kota menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
 - (8) KPU Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - (9) KPU Kota menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
 - (10) KPU Kota menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
 - (11) KPU Kota menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
- IV. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam romawi III ayat (10).
- V. Dalam hal KPU Provinsi tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 romawi III dan huruf C romawi III kepada KPU.

- VI. (1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan-2

- I. (1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
- (2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. Daftar Pemilih Pindahan

- I. (1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam dalam BAB III huruf B angka 2 romawi III dan BAB III huruf romawi III dapat dilengkapi dengan DPPh.

- (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
 - (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- II.
- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- III.
- (1) PPS atau KPU Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam romawi II, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
 - (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.
 - (3) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- I. (1) KPU Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara, KPU Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- II. (1) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam romawi I diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK dan PPS.
- (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- I. KPU Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- II. KPU Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kota, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kota.
- III. (1) KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota.

BAB VII FORMULIR

Jenis Formulir dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

| NO | KODE | NAMA |
|---------|-------------|---|
| MODEL A | | |
| 1. | A-KWK | Data Pemilih |
| 2. | AA-KWK | Data Pemilih Baru |
| 3. | AA.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih |
| 4. | AA.2-KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian |
| 5. | A1-KWK | Daftar Pemilih Sementara |
| 6. | A1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kelurahan |
| 7. | A1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan |
| 8. | A1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota |
| 9. | A1.A-KWK | Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS |
| 10. | A2-KWK | Daftar Tanggapan Masyarakat |
| 11. | A3-KWK | Daftar Pemilih Tetap |
| 12. | A3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan |
| 13. | A3.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan |
| 14. | A3.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota |
| 15. | A.Tb1-KWK | Daftar Pemilih Tetap Tambahan |
| 16. | A.Tb1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kelurahan |
| 17. | A.Tb1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan |
| 18. | A.Tb1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kota |
| 19. | A.4-KWK | Daftar Pemilih Pindahan |
| 20. | A.5-KWK | Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) |
| 21. | A.Tb2-KWK | Daftar Pemilih Tambahan-2 |



PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : SURABAYA

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

Model A-KWK

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bitit as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|---------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya
- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Model AA-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : SURABAYA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal,

PPDP

Hal ... dari ...

(.....)

Model AA.1-KWK

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |

Ditanda tangani di Surabaya

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

.....

Model AA.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |

Ditanda tangani di Surabaya

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WAIKOTA DAN WAKIL WAIKOTA
TAHUN 2015

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : SURABAYA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bitl as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A1.1-KWK

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | | Tanda Tangan | |
| 2. Anggota | | | | | |
| 3. Anggota | | | | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A1.2-KWK

KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nama Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Surabaya,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | | Tanda Tangan | |
| 2. Anggota | | | | | |
| 3. Anggota | | | | | |
| 4. Anggota | | | | | |
| 5. Anggota | | | | | |



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH KPU KOTA**

Model A1.3-KWK

**KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

- | | |
|---|---|
| <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Anggota</p> <p>4. Anggota</p> <p>5. Anggota</p> | <p style="text-align: right;">Nama</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan</p> |
|---|---|



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kota Surabaya Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015**

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : SURABAYA

DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA
TAHUN 2015

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :
.....

Model A2-KWK

| No | JENIS TANGGA PAN | KET. DATA | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perka winan B/S/P/g | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa blitt as | Hasil Pemeriksaan |
|----|-----------------------|-----------|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|-------------------|--------|----|----|---------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



PROVINSI
KOTA

: JAWA TIMUR
: SURABAYA

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA
TAHUN 2015

Kecamatan
Kelurahan
TPS

Model A3-KWK

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bitf as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Runggu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
 - S : Kawin
 - P : Pernah Kawin
- Hal ... dari ...

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A3.1-KWK

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | | |
|------------|-------|--------------|
| | Nama | Tanda Tangan |
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPK**

A.3-2-KWK.KPU

KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nama Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Surabaya,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | |
|---|---|
| <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Anggota</p> <p>4. Anggota</p> <p>5. Anggota</p> | <p style="text-align: right;">Nama</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan</p> |
|---|---|



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH KPU KOTA**

A.3.3-KWK.KPU

KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama</td> <td style="width: 50%;">Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> | Nama | Tanda Tangan | | | | | | | | | | |
| Nama | Tanda Tangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Model A. Tb1-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : SURABAYA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bit as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
Ketua
(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A. Tb1.1-KWK

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | | |
|------------|-------|--------------|
| | Nama | Tanda Tangan |
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.Tb1.2-KWK

KECAMATAN :
KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nama Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Surabaya,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | | Tanda Tangan | |
| 2. Anggota | | | | | |
| 3. Anggota | | | | | |
| 4. Anggota | | | | | |
| 5. Anggota | | | | | |



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
OLEH KPU KOTA**

Model A.Tb1.3-KWK

KOTA : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Surabaya,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama</td> <td style="width: 50%;">Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> | Nama | Tanda Tangan | | | | | | | | | | |
| Nama | Tanda Tangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Model AA-KWK

PROVINSI
KOTA

: JAWA TIMUR
: SURABAYA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

| No | No KK | NIK | Nama | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bilit as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|-------------------|--------|----|----|---------------|------------|
| | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Ditetapkan di Surabaya, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

Model A.5-KWK



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel : Ketua,
3 Kecamatan :
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



Model A.5-KWK



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *) : Panitia Pemungutan Suara
1 TPS : Ketua,
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan :
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : SURABAYA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :
.....

Model A.Tb2-KWK

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disa bit as | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|--------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungtu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
Hal ... dari ...

Ditetapkan di Surabaya,, Tanggal,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua
(.....)

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

- I. (1) Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
- II. (1) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
- III. Dalam Pemilihan, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 romawi III dan BAB III huruf C romawi III digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
- IV. (1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kota.

SALINAN

- V. Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB IX
PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 22 April 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,



Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001